

MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4		Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan	
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif																					
1	Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Angka	3,754	3,754	3,29	87,64%	3,754	3,29	87,64%	3,754	3,339	88,95%	INSPEKTUR DAERAH	1. Terjadinya mutasi pejabat pengampu SAKIP di perangkat daerah belum diikuti dengan pengembangan pejabat baru pengganti terhadap pengelolaan SAKIP. 2. Keterlambatan terbitnya Surat Edaran tentang Penyusunan Laporan Kinerja, sehingga Perangkat Daerah 3. Surat Edaran untuk penyusunan Laporan Kinerja terbit di awal tahun berikutnya yang biasanya penyusunan Laporan Kinerja sudah mulai di akhir tahun anggaran sehingga jika ada perubahan menyebabkan adanya perubahan atas Laporan Kinerja yang sudah mulai disusun.	1. Adanya pedoman penyusunan Laporan Kinerja untuk keseragaman sistematika dan variabel pendukung yang perlu dilaporkan oleh perangkat daerah sebagai pendukung penilaian SAKIP 2. Adanya sosialisasi oleh Evaluator SAKIP dari Kemenpan RB sebagai pengayaan dan pencerahan bagi perangkat daerah dalam pengelolaan SAKIP.	1. Meningkatkan kualitas evaluasi internal secara konsisten dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing PD.	1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan bersama instansi terkait terhadap pembuatan dokumen perencanaan, pelaporan maupun evaluasi. 2. Mengunggah laporan hasil evaluasi pada aplikasi esr.menpan.go.id.			
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	15,99	8,2	15,99	195,00%	15,99	15,99	100,00%	15,99	17,19	107,50%	15,99	17,19	107,50%	INSPEKTUR DAERAH	1. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan namun masih terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target yang sudah diperjanjikan. 2. Evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah dilakukan setiap triwulan. Hasil evaluasi berupa rekomendasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada PPTK dan sudah ditindaklanjuti, namun evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan belum dilaksanakan tepat waktu.	1. Adanya komitmen dari pimpinan. 2. Peningkatan kualitas pemahaman pegawai terhadap SAKIP.	1. Melakukan upaya perbaikan untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. 3. Tepat waktu dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.	1. Melakukan upaya perbaikan untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tepat waktu
2	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	86,22	82	86,2	105,12%	86,22	86,2	99,98%	86,22	87,18	101,11%	86,22	87,18	101,11%	INSPEKTUR DAERAH	1) Rencana pelatihan/pengembangan diklat belum didasarkan pada analisis gap kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan. 2) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum diintegrasikan dengan profil risiko Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan (Enterprise Risk Management/ERM). 3) Belum ada pedoman audit ketaatan yang disusun sesuai current issue. 4) Pendokumentasian atas kegiatan evaluasi berkelanjutan belum optimal.	1. Komitmen Pimpinan 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam hal pengawasan terhadap hasil pemeriksaan dan cara mendianjajutnya dapat memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 3. Pemilihan jenis pelatihan yang tepat guna meningkatkan mutu hasil pengawasan	1) Melakukan evaluasi setiap topik kapabilitas terkait kebijakan, implementasi dan hasil, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan. 2) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah, khususnya tentang penguatan aspek SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. 3) Membangun dan mengimplementasikan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang diintegrasikan dengan profil risiko Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan (Enterprise Risk Management/ERM).	1. Melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan 2. Pengadaan CPNS 2024 sebanyak 14 orang 3. Melaksanakan Diklat teknis dan diklat kompetensi minimal 120 JP dalam satu tahun 4. Menyusun PPBR Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
		Kapabilitas APFIP	Angka	3,3	3,3	3,06	92,73%	3,3	3,06	92,73%	3,3	3,06	92,73%	3,3	3,1	93,94%	INSPEKTUR DAERAH	<p>1. Kurangnya Komitmen Jika pimpinan atau pegawai tidak memiliki komitmen terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pelaksanaannya cenderung tidak efektif.</p> <p>2. SDM yang Kurang Memadai: Keterbatasan jumlah atau rendahnya kualitas SDM yang menurangi awareness mengenai pentingnya tindak lanjut serta cara pelaksanaannya dapat menjadi penghambat.</p> <p>3. Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindak lanjut sering kali membuat proses menjadi lambat dan tidak efektif.</p> <p>4. Ketidappahaman terhadap Rekomendasi: Tidak semua pihak memahami dengan baik rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dapat menyebabkan tidak dilakukannya tindak lanjut dengan tepat.</p> <p>5. Resistance terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menghambat proses perbaikan.</p> <p>6. Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu membuat proses tindak lanjut membutuhkan waktu yang lama.</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi sangat penting. Pimpinan yang peduli dan aktif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan akan mendorong pegawai untuk melaksanakan rekomendasi dengan baik.</p> <p>2. Sistem pengawasan internal yang baik: Adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dapat membantu memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara konsisten.</p> <p>3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam hal pemahaman terhadap hasil pemeriksaan dan cara menindaklanjutinya dapat memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p> <p>4. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta prosedur yang jelas, membuat proses menjadi lebih terarah dan terukur.</p> <p>5. Sistem Informasi yang Memadai: Penggunaan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi terkait hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas monitoring.</p>	<p>1. Penguatan Komitmen Pimpinan: Mendorong pimpinan untuk lebih aktif terlibat dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mengadakan forum atau pertemuan rutin antara pimpinan dan staf untuk membahas hasil pemeriksaan dan langkah tindak lanjut.</p> <p>2. Koordinasi Antara Instansi: Meningkatkan koordinasi antara BPK RI APFIP, dan BPKP untuk memastikan keselarasan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan.</p> <p>3. Membentuk tim koordinasi lintas instansi yang dapat mempercepat proses tindak lanjut.</p> <p>4. Penerapan Sistem Reward and Punishment: Menyiapkan mekanisme penghargaan bagi unit kerja yang berhasil melaksanakan tindak lanjut dengan baik. Menentukan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>5. Evaluasi Berkala: Membuat mekanisme evaluasi berkala untuk menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi.</p> <p>6. Menyusun laporan evaluasi yang jelas dan terstruktur untuk disampaikan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.</p> <p>7. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan sistem aplikasi teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara real-time.</p> <p>8. Mengembangkan dashboard yang dapat diakses oleh pimpinan untuk memonitor progres tindak lanjut.</p>	<p>1. Melakukan koordinasi antar instansi dengan pemeriksa internal (BPKP, Inspektorat Prop Jateng) dan Pemeriksa Eksternal.</p> <p>2. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui SIMWAS online dan SIPTL.</p> <p>3. Melakukan rapat pada area pengawasan saat diseleenggarakan rapat evaluasi kinerja setiap bulan dengan pimpinan.</p>
3	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	97%	25%	69%	276,32%	97%	91%	94,14%	97%	89,59%	92,36%	97%	98%	101,04%	INSPEKTUR DAERAH	<p>1)Pihak terkait (Perusahaan/ personal) dengan temuan sudah meninggal, pensiun, atau tidak diketahui alamatnya</p> <p>2)Dokumen-dokumen terkait sulit ditemukan atau hilang</p> <p>3)Komunikasi antara pemeriksa dan auditee kurang baik</p> <p>4)Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/sepertuhan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>5)Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi</p> <p>6)Adanya pihak ketiga / instansi vertikal dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.</p>	<p>1)Adanya komunikasi yang baik antara pemeriksa dan auditee</p> <p>2)tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM</p> <p>3)Adanya pemantauan dan pendampingan terhadap tindak lanjut temuan</p>	<p>1)Mengupayakan sedemi mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai.</p> <p>2)Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindak lanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati</p> <p>3)Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.</p> <p>4)Mengoptimalkan Koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.</p> <p>5)Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.</p>	<p>1)Secara rutin dilakukan fasilitasi dengan entitas yang masih mempunyai tunggakan temuan agar dapat diselesaikan</p> <p>2)Mengkomunikasikan dengan pihak pemeriksa apabila entitas kesulitan menindaklanjuti</p> <p>3)Memberikan tegoran kepada pimpinan entitas sebagai bentuk upaya mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut</p>

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG.



LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif																					
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (urusan Pengawasan Reformasi Birokrasi)	Persen	72,5	63	63,13	100,206	66	66,88	101,333	69	70	101,449	72,5	100	137,931	IRBANWAS RB				
	a. Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya meningkat	Persen	16,67	0	0	0	0	0	0	16,67	96	575,885	16,67	96	575,885	IRBANWAS RB				
	1) Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	25	6	24	400	12	30	250	18	30	166,667	25	59	236	IRBANWAS RB	Kurangnya kesadaran OPD dalam mengisi realisasi renakst tepat waktu.	Komitmen dan motivasi dari Koordinator RB pada OPD untuk peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	- Membentuk tim Koordinasi Lintas Instansi yang dapat mempercepat proses tindak lanjut - Berkoordinasi dengan evaluator meso terkait strategi peningkatan	Berkoodinasi dengan PIC tiap indikator kegiatan maupun dengan OPD pengampu indikator untuk mengisi realisasi pada portal RB General maupun RB Tematik
	2) Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	4	15	375	8	17	212,5	12	24	200	16	27	168,75	IRBANWAS RB	- Beberapa OPD tidak memahami terkait data dukung area MCP. - Sosialisasi anti korupsi masih bergantung pada Inspektorat - UPG Pembantu belum menjalankan fungsinya secara optimal. - UPG membantu belum menyampaikan laporan Gratifikasi secara berkala	Komitmen pimpinan dalam upaya memberikan wawasan terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai	- Melibatkan personil OPD untuk menjadi PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) - Berkoodinasi dengan PIC KPK secara rutin terkait data dukung area MCP - Optimalisasi peran UPG Pembantu dalam menyampaikan laporan Gratifikasi secara berkala	- Mengkomunikasikan dengan PIC KPK dan mencari informasi bentuk data dukung dari daerah lain. - Pembuatan Surat Edaran Inspektorat Daerah tentang Permohonan calon personil PAKSI dari OPD di lingkungan pemerintah kota magelang - Pembuatan jadwal sosialisasi terkait Pemahaman Gratifikasi/Anti Korupsi dan tugas UPG Pembantu
	3) Meningkatnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	30	7	14	200	15	30	200	22	30	136,364	30	30	100	IRBANWAS RB	- Kualitas paparan OPD dalam rangka evaluasi tahap wawancara masih kurang (belum sesuai dengan ketentuan) - Pemahaman terkait Pembangunan ZI belum merata di seluruh OPD	- Telah diraihnya predikat WBK pada 3 OPD di Kota Magelang - Komitmen pimpinan dan jajaran dalam Pembangunan ZI	Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait Pembangunan ZI ke seluruh OPD	- Inspektorat mendampingi dalam penyusunan paparan masing - masing OPD. - Pembuatan Surat Edaran Inspektorat Daerah tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang - Melakukan benchmarking ke daerah lain dalam pembangunan ZI dengan melibatkan OPD/ Unit Kerja - Pembuatan jadwal sosialisasi terkait Pembangunan ZI ke seluruh OPD

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH



LARSITA, S.E., M.Sc., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

IRBANWAS RB



ENY KUSUMADEWI, S.E., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19761027 199603 2 002

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif																					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (Urusan Pengawasan Khusus)	Persen	94,5	25	45,12	180,48	50	70,72	141,44	75	115,67	154,227	94,5	147,36	155,937	IRBANWAS KHUSUS				
	a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	Persen	95	95	100	105,263	95	100	105,263	95	100	105,263	95	100	105,263	IRBANWAS KHUSUS				
	1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Laporan	25	2	6	300	9	18	200	22	27	122,727	25	34	136	IRBANWAS KHUSUS	1. Memperoleh data dan informasi terkadang menemui kesulitan karena dimungkinkan obrik menutupi kondisi yang senyatanya (tidak kooperatif); 2. Pemeriksa internal mempunyai kewenangan yang terbatas kepada pihak-pihak diluar pemkot; 3. Belum sepenuhnya Pemeriksa memiliki kompetensi Inventigasi	1. Adanya kepercayaan dari mitra kerja pengawasan terhadap Inspektorat untuk menangani pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pemeriksaan khusus' 2. Adanya fasilitasi kerjasama antara APIP-APH sehingga memudahkan koordinasi;	1. Meningkatkan kompetensi bagi Auditor terkait Investigasi dan penghitungan kerugian negara/daerah	Mengirim auditor mengikuti Diklat Audit Forensik dan Audit Investigasi
	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (urusan Pengawasan Reformasi Birokrasi)	Persen	72,5	63	63,13	100,206	66	66,88	101,333	69	70	101,449	72,5	100	137,931	IRBANWAS KHUSUS				
	a. Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya meningkat	Persen	16,67	0	0	0	0	0	0	16,67	96	575,885	16,67	96	575,885	IRBANWAS KHUSUS				
	1) Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	10	0	1	200	5	5	100	7	6	85,7143	10	10	100	IRBANWAS KHUSUS	1. Terkait Pendampingan Hukum dan Fasilitasi pendampingan, ditemukan kendala dalam menyamakan persepsi antara APIP, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak terkait lainnya karena masing masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda; 2. Dalam pelaksanaan kegiatan Saber Pungli, sering tidak sesuai dengan renaksi yang telah ditetapkan karena terkendala dengan jadwal masing-masing instansi terkait	1. Semua Instansi terkait telah membangun komitmen bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama; 2. Sudah terbentuk sekretariat Satgas Saber Pungli.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Instansi terkait pelaksanaan kegiatan	1. Melakukan rapat rutin bulanan; 2. Membentuk WAG untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak; 3. Melakukan konsolidasi dengan para pihak secara insidental terkait dengan membutuhkan penanganan khusus.

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH



LARISTA, S.E., M.Sc. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

PIL. IRBANWAS KHUSUS



INDAH SRI PALUPI, S.H., M.AP
Pembina
NIP. 19730813 199803 2 005

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif																					
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (Urusan Pemerintahan Daerah)	Persen	94,5	25	45,12	180,48	50	70,72	141,44	75	115,67	154,227	94,5	147,36	155,937	IRBANWAS PPD				
	a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan (Urusan Pemerintahan Daerah)	Persen	96	25	69,08	276,32	50	91,32	182,64	75	89,59	119,453	96	98,01	102,094	IRBANWAS PPD				
	1) Meningkatkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	24	0	0	0	24	29	120,833	24	29	120,833	24	29	120,833	IRBANWAS PPD	Data dukung OPD tidak lengkap dan tidak benar , adanya mutasi pejabat yang tidak berkompoten	Meningkatnya uji kompetensi pejabat fungsional	Penambahan SDM fungsional yang berkompoten	Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan
	2) Meningkatkan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	25	5	5	100	10	17	170	25	27	108	25	30	120	IRBANWAS PPD	Jadwal reviu /pemeriksaan/evaluasi yang merupakan mandatory yang berbarengan dari awal tahun sampai dengan semester satu . Ditambah adanya permohonan reviu insidentil OPD yang insidentil dan tidak terjadwal	Meningkatnya uji kompetensi pejabat fungsional	Penambahan SDM fungsional yang berkompoten	Menyusun pedoman teknis pelaksanaan reviu
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (Urusan Pemerintahan Daerah)	Persen	72,5	63	63,13	100,206	66	66,88	101,333	69	70	101,449	72,5	100	137,931	IRBANWAS PPD				
	a. Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev	Persen	25	25	100	400	25	100	400	25	100	400	25	100	400	IRBANWAS PPD				
	1) Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	11	11	6	54,5455	11	12	109,091	11	28	254,545	28	16	57,1429	IRBANWAS PPD	Adanya regulasi pemerintah yang selalu berganti .	Adanya koordinasi positif dengan OPD mitra kerja	Penambahan SDM fungsional yang berkompoten	Segera menterjemahkan makna dan substansi regulasi serta memberikan sosialisasi kepada OPD mitra kerja

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH



LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

IRBANWAS PPD



TUTIK DAMAYANTI, S.E.
Pembina Tk.I
NIP. 19710403 199803 2 010

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Uraian yang lebih diutamakan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Mis. 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif																					
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (Urusan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja)	Persen	94,5	25	45,12	180,48	50	70,72	141,44	75	115,67	154,227	94,5	147,36	155,937	IRBANWAS AKK				
	1. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase eritas yang sudah memindai/tepat hasil pemeriksaan (Urusan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja)	Persen	96	25	69,08	276,32	50	91,32	182,64	75	89,59	119,453	96	98,01	102,094	IRBANWAS AKK				
	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	0	0	0	3	0	0	7	5	71,4286	10	16	160	IRBANWAS AKK	Waktu permohonan kegiatan mandatori tidak sesuai jadwal, keterbatasan SDM karena audit kinerja memerlukan waktu yang panjang dan beberapa tahapan	Kegiatan harus dilaksanakan baik yang mandatori maupun yang tidak mandatori karena berkaitan dengan pemerataan wajib untuk proses kegiatan tingkat pemda/kota	Pemenuhan jumlah SDM, berkorelasi dengan beban lainnya	Pemenuhan pelaksanaan kegiatan dengan mengatur waktu dan SDM yang ada agar audit dapat terlaksana tepat waktu
	2) Meningkatkan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	7	2	2	100	3	7	233,333	5	9	180	7	18	257,143	IRBANWAS AKK	Hambatan: Terdapat kegiatan mandatori yang harus dilaksanakan.	Kegiatan harus dilaksanakan baik yang mandatori maupun yang tidak mandatori karena berkaitan dengan pemerataan wajib untuk proses kegiatan tingkat pemda/kota	Pengaturan pelaksanaan kegiatan dengan mengoptimalkan SDM dan waktu yang ada	Pemenuhan pelaksanaan kegiatan dengan mengatur waktu dan SDM yang ada agar audit dapat terlaksana tepat waktu
	3) Meningkatkan Revu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan	Laporan	29	5	10	200	15	20	133,333	20	32	160	29	52	179,31	IRBANWAS AKK	Kegiatan terkonsentrasi pada kegiatan mandatori, yang pengusulannya tidak serentak, sehingga kegiatan pengawasan di luar mandatori belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan SDM.	Kegiatan harus dilaksanakan baik yang mandatori maupun yang tidak mandatori karena berkaitan dengan pemerataan wajib untuk proses kegiatan tingkat pemda/kota	Fokus pelaksanaan kegiatan pada mandatori, Pemenuhan waktu, Untuk dapat terlaksanakan kegiatan di luar mandatori perlu penambahan jumlah SDM.	Pemenuhan pelaksanaan kegiatan dengan mengatur waktu dan SDM yang ada agar audit dapat terlaksana tepat waktu

Mengetahui,

INSPEKTUR DAERAH



LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE
Pembinu Utama Muda
NIP. 196612021990031008

IRBANWAS AKK



Drs. F. H. H. MURDO, M.Si
Pembinu TA. I
NIP. 196103011992031007

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif																					
1	Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS				
a	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung	Penambahan SDM	Koordinasi dengan OPD terkait
b	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan OPD terkait
c	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Keterbatasan SDM yang menangani kepegawaian dan minimnya mengikuti pelatihan kepegawaian	Adanya Peraturan berkaitan dengan kepegawaian	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan OPD terkait
d	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi	Peningkatan Anggaran	Selectif dalam penyediaan kebutuhan
e	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran	Penghematan dan tertib administrasi	Koordinasi dengan pihak terkait
f	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan	Inventarisasi BMD yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan	Selectif dalam pemeliharaan
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (monev tindak lanjut)	Persen	94,5	25	45,12	180,48	50	70,72	141,44	75	115,67	154,227	94,5	147,36	155,937	SEKRETARIS				
a	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan Internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan (Urusan Sekretariat)	Persen	96	25	69,08	276,32	50	91,32	182,64	75	89,59	119,453	96	98,01	102,094	SEKRETARIS	Kurangnya pemahaman OPD dalam menindaklanjuti temuan	Keseriusan OPD dalam menindaklanjuti temuan	Komitmen waktu OPD dalam penyelesaian tindak lanjut	Koordinasi dengan OPD terkait
3	Meningkatnya kegiatan pendampingan dan asistensi kepada entitas	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (Kebijakan teknis pengawasan)	Persen	72,5	63	63,13	100,206	66	66,88	101,333	69	70	101,449	72,5	100	137,931	SEKRETARIS				
a	Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu	Persen	100	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS	Keterlambatan Penetapan peraturan terkait	Adanya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dari Pusat	Penyusunan kebijakan pengawasan sesuai kebijakan yang dirumuskan dari Pusat	Koordinasi dengan Instansi terkait

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

SEKRETARIS



DANIEL PRIYOWATORO, SE., MSI.
Pembina Tk.I
NIP. 19710208 199803 1 010

MONEY RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Uraian yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif																				
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	dokumen	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB BAG EVALAP	<p>1. Masih terdapat pimpinan OPD yang komitmennya kurang untuk menindaklanjuti jika pimpinan atau pegawai tidak memiliki komitmen terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pelaksanaannya cenderung tidak efektif</p> <p>2. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani tindak lanjut sehingga berpengaruh terhadap kecepatan obruk terhadap tindak lanjut hasil temuan/rekomendasi</p> <p>4. Ketidappahaman terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi</p> <p>4. Rekomendasi Tidak semua pihak memahami dengan baik rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dapat menyebabkan tidak dilaksanakannya tindak lanjut dengan tepat</p> <p>5. Resistance terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menghambat proses perbaikan</p> <p>6. Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu membuat proses tindak lanjut membutuhkan waktu yang lama</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan: Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi sangat penting. Pimpinan yang peduli dan aktif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan akan mendorong pegawai untuk melaksanakan rekomendasi dengan baik.</p> <p>2. Sistem pengawasan internal yang baik. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dapat membantu memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara konsisten.</p> <p>3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam hal pemahaman terhadap hasil pemeriksaan dan cara menindaklanjutinya dapat memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p> <p>4. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta prosedur yang jelas, membuat proses menjadi lebih terarah dan terukur.</p> <p>5. Sistem Informasi yang Memadai: Penggunaan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi terkait hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas monitoring.</p>	<p>1. Penguatan Komitmen Pimpinan: Mendorong pimpinan untuk lebih aktif terlibat dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mengadakan forum atau pertemuan rutin antara pimpinan dan staf untuk membahas hasil pemeriksaan dan langkah tindak lanjut.</p> <p>2. Koordinasi Antara Instansi: Meningkatkan koordinasi antara BPK RI, APSP, dan BPPK untuk memastikan keselarasan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan.</p> <p>3. Membentuk tim koordinasi lintas instansi yang dapat mempercepat proses tindak lanjut.</p> <p>3. Penerapan Sistem Reward and Punishment: Menyiapkan mekanisme penghargaan bagi unit kerja yang berhasil melaksanakan tindak lanjut dengan baik.</p> <p>4. Menentukan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.</p> <p>4. Evaluasi Berkala: Membuat mekanisme evaluasi berkala untuk menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi.</p> <p>Menyusun laporan evaluasi yang jelas dan terstruktur untuk disampaikan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan sistem aplikasi teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara real-time.</p> <p>Mengembangkan dashboard yang dapat diakses oleh pimpinan untuk memonitor progres tindak lanjut.</p>	<p>1. Melakukan koordinasi antar instansi dengan pemeriksa internal (BPKP, Inspektori Prop, Jatejeng dan Pemeriksa Eksternal)</p> <p>2. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui SDMWAS online dan SPTL</p> <p>3. Melakukan rapat pada area pengawasan saat disinggarkan rapat evaluasi kinerja setiap bulan dengan pimpinan</p>
2	Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	1	0	0	0	0	0	0	0	1	200	1	2	200	KASUB BAG EVALAP	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perencanaan pengawasan pemerintahan daerah yang diterbitkan diakhir tahun, sehingga menyulitkan penyusunan kebijakan pengawasan, karena Permandagri tersebut mengatur tentang arah kebijakan tahun berjalan</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan SDM yang memahami PPBR dapat menghambat kemampuan organisasi untuk merancang dan melaksanakan program kerja pengawasan secara optimal.</p>	<p>1. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung: Kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam bentuk Permandagri tentang Perencanaan Pengawasan Daerah yang memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan dapat menjadi pendorong bagi penyusunan program kerja.</p> <p>2. Pemahaman terhadap Risiko dan Tantangan: Identifikasi dan pemahaman yang baik terhadap risiko yang dihadapi organisasi memungkinkan penyusunan program kerja yang responsif dan berbasis risiko.</p> <p>3. Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pegawai, manajemen, dan pihak eksternal (misalnya, auditor, mitra kerja), dapat memberikan perspektif yang beragam dan meningkatkan relevansi program kerja pengawasan.</p> <p>4. Analisis Kinerja Sebelumnya: Evaluasi dan analisis kinerja dari tahun-tahun sebelumnya bisa memberikan insight tentang area yang perlu diperbaiki dan fokus pengawasan ke depan.</p> <p>5. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan: Program pelatihan bagi para pengawas dan pejabat struktural untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik pengawasan berbasis risiko dapat berkontribusi dalam penyusunan program kerja yang efektif.</p>	<p>1. Mengidentifikasi Risiko dan Tantangan: Melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi organisasi. Kebijakan pengawasan harus responsif terhadap risiko tersebut.</p> <p>2. Ketersediaan Kapasitas Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan kepada tim penyusun kebijakan pengawasan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik.</p> <p>3. Sosialisasi Kebijakan: Melakukan sosialisasi yang efektif mengenai kebijakan pengawasan kepada seluruh anggota organisasi agar mereka memahami tujuan, proses, dan peran masing-masing dalam pelaksanaannya.</p>	<p>1. Merumuskan manajemen risiko pada masing masing OPD</p> <p>2. Mengikuti diklat penyusunan PPBR secara berkala</p>

Megetahu,
SEKRETARI

DANI PRJOWATORO, SE, MSI
Pembina Tk I
NIP. 19710208 199803 1 010

KASUB BAG EVALAP

DANI PRJOWATORO, SE, MSI
Pembina
NIP. 19710208 199803 2 005

MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

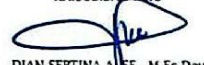
UNIT KERJA: SUB. BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM KEPEGAWAIAN (PKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
Misi 3 - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	0	2	200	1	2	200	2	2	100	2	9	450	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung	Penambahan SDM	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0	1	200	1	1	100	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung	Penambahan SDM	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung	Penambahan SDM	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung	Penambahan SDM	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung	Penambahan SDM	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	0	1	200	1	1	100	2	2	100	2	2	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	30	30	30	100	30	30	100	30	30	100	30	30	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Sistem dari pusat sering terkendala	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
8	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
10	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap)
11	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	0	2	0	1	2	200	1	4	400	2	4	200	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan SDM yang menangani kepegawaian dan minimnya mengikuti pelatihan kepegawaian	Adanya Peraturan berkaitan dengan kepegawaian	Penambahan SDM dan pelatihan	Koordinasi dengan bidang lain (Irbn dan kasubag evalap), Koordinasi dengan Instansi Pembina
12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	0	0	0	5	5	100	0	0	0	10	10	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terbait administrasi	Peningkatan Anggaran	Selektif dalam penyediaan kebutuhan
13	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terbait administrasi	Peningkatan Anggaran	Selektif dalam penyediaan kebutuhan
14	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terbait administrasi	Peningkatan Anggaran	Selektif dalam penyediaan kebutuhan
15	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terbait administrasi	Peningkatan Anggaran	Selektif dalam penyediaan kebutuhan
16	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terbait administrasi	Peningkatan Anggaran	Selektif dalam penyediaan kebutuhan
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terbait administrasi	Peningkatan Anggaran	Selektif dalam penyediaan kebutuhan
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran	Penghematan dan tertib administrasi	Koordinasi dengan pihak terkait
19	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran	Penghematan dan tertib administrasi	Koordinasi dengan pihak terkait
20	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3	3	100	6	6	100	9	9	100	12	12	100	KASUB.BAG .PKU	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran	Penghematan dan tertib administrasi	Koordinasi dengan pihak terkait

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukam
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					
21	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan	Iventarisasi BMD yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan	Selektif dalam pemeliharaan
22	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan	Iventarisasi BMD yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan	Selektif dalam pemeliharaan
23	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan	Iventarisasi BMD yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan	Selektif dalam pemeliharaan
24	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	32	8	8	100	16	16	100	24	24	100	32	32	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan	Iventarisasi BMD yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan	Selektif dalam pemeliharaan
25	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan	Iventarisasi BMD yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan	Selektif dalam pemeliharaan

Megetahui,
SEKRETARIS

DANIEL PRIYOWATORO, SE.,MSI.
Pembina Tk I
NIP. 19710208 199803 1 010

KA.SUB.BAG .PKU

DIAN SEPTINA A. SE., M.Ec.Dev
Penata Tk I
NIP. 19870918 201001 2 019